



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Pramuka Nomor 17, Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36613  
Telepon (0743) 21771 Faks. (0743) 22940  
Laman dishub.batangharikab.go.id Pos-el dishub@batangharikab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN BATANG HARI**

**NOMOR : 25. A TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan public, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu mengatur Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau Standar Prosedur Tetap pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur pada Kearsipan Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 125),

*Tambahan lembaran.....*

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 10);
  7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Batang Hari Tahun 2016 Nomor 48).

*Memutuskan.....*

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Batang Hari Tahun 2016 Nomor 48).

*Memutuskan.....*

## MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

### Menetapkan :

PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari pada lampiran surat keputusan ini meliputi:

#### A. Sekretariat

- 1) Layanan Pengurusan Gaji Berkala
- 2) Layanan Pengurusan Surat Masuk
- 3) Layanan Pengurusan Surat Keluar.
- 4) Layanan Pengurusan Kenaikan Pangkat
- 5) Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 6) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
- 7) Layanan Pengurusan Izin dan Cuti Pegawai
- 8) Layanan Pengidentifikasian Aset
- 9) Layanan Pengurusan Pensiun
- 10) Layanan Penyusunan DUK dan Daftar Normatif Pegawai
- 11) Layanan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
- 12) Layanan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
- 13) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- 14) Layanan Pengelolaan dan Administrasi Keuangan
- 15) Layanan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

#### B. Bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal

- 1) Layanan Pengelola Perparkiran
- 2) Izin Penggunaan Jalan

#### C. Bidang Moda Transportasi

- 1) Layanan Permohonan Pinjam/Pakai Bus

*D. Bidang Keselamatan.....*

D. Bidang Keselamatan Lalu Lintas

- 1) Layanan Mutasi Uji Keluar Kendaraan Bermotor
- 2) Layanan Pengujian Pertama Kendaraan Bermotor
- 3) Layanan Pengujian Pertama Kendaraan Bermotor
- 4) Layanan Numpang Uji Keluar Kendaraan Bermotor

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari serta aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Batang Hari.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 02 April 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BATANG HARI



BAIDAWI

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian,
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN  
NOMOR : 25.A TAHUN 2024  
TANGGAL : 02 APRIL 2024

**TENTANG**

**DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA SOP</b>	<b>BIDANG</b>	<b>TAHUN</b>
1	Pengurusan Gaji Berkala	Sekretariat	2024
2	Pengurusan Surat Masuk	Sekretariat	2024
3	Pengurusan Surat Keluar	Sekretariat	2024
4	Layanan Pengurusan Kenaikan Pangkat	Sekretariat	2024
5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat	2024
6	Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat	2024
7	Pengurusan Pensiun	Sekretariat	2024
8	Pengurusan Izin dan Cuti Pegawai	Sekretariat	2024
9	Pengidentifikasian Aset	Sekretariat	2024
10	Penyusunan DUK dan Daftar Normatif Pegawai	Sekretariat	2024
11	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Sekretariat	2024
12	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Sekretariat	2024
13	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Sekretariat	2024
14	Pengelolaan dan Administrasi Keuangan	Sekretariat	2024
15	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Sekretariat	2024

16	Pengelola Perparkiran	Bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal	2024
17	Izin Penggunaan Jalan	Bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal	2024
18	Permohonan Pinjam/Pakai Bus	Bidang Moda Transportasi	2024
19	Mutasi Uji Keluar Kendaraan Bermotor	Bidang Keselamatan Lalu Lintas	2024
20	Mutasi Uji Masuk Kendaraan Bermotor	Bidang Keselamatan Lalu Lintas	2024
21	Pengujian Pertama Kendaraan Bermotor	Bidang Keselamatan Lalu Lintas	2024
22	Numpong Uji Keluar Kendaraan Bermotor	Bidang Keselamatan Lalu Lintas	2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BATANG HARI

